



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Menggelar Sidang Pemeriksaan PHP Kada Kota Banjarmasin**

**Jakarta, 1 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kota Banjarmasin (Nomor Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021) yang diajukan oleh Paslon Nomor (Paslon) Urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir. Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan digelar pada Senin (01/03/2021) di persidangan Panel II yang dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada persidangan perdana yang diselenggarakan pada Selasa (26/01/2020) pukul 10.30 WIB, Pemohon memamparkan bahwa terdapat pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 yaitu penggunaan fasilitas negara oleh Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) selaku pemenang Pilkada. Kemudian, Pemohon juga menduga bahwa pada proses pemungutan suara, terdapat ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam data yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat. Ribuan pemilih tersebut diduga merupakan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Petahana demi memenangkan Pilkada. Ananda-Mushaffa juga menuding bahwa Paslon Petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan daerah dengan menggunakan fasilitas pemerintah, penyalahgunaan program dan kecurangan lainnya yang keseluruhannya memengaruhi hasil Pilkada secara signifikan.

Pada persidangan kedua dengan agenda mendengar jawaban KPU Kota Banjarmasin selaku Termohon yang dilaksanakan pada Senin (01/02/2021), Termohon mengungkapkan kepada Mahkamah bawa Permohonan yang diajukan Ananda-Mushaffa kabur dan tidak jelas. Lebih lanjut, kuasa hukum KPU Kota Banjarmasin menilai bahwa posita yang diajukan Pemohon bertentangan dengan isi petitum Pemohon. Pemohon juga tidak memberikan uraian lengkap perihal alasan Permohonannya.

Di kesempatan yang sama, Bawaslu Kota Banjarmasin juga memberikan keterangan perihal jalannya Pilkada di kota tersebut. Kepada Mahkamah, Bawaslu menegaskan bahwa keseluruhan proses Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 berjalan lancar. Bawaslu juga menjelaskan bahwa tidak ada temuan pelanggaran dari hasil pengawasan terkait dugaan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang kesemuanya dimanfaatkan demi memenangkan Paslon Petahana. **(rosmalina).**